



SEKRETARIAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024 LKJIP

“LKJIP disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berorientasi pada hasil guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program serta kebijakan yang telah dilakukan”

Disiapkan Oleh :  
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN



Komplek Perkantoran Bukit Menderang  
Jl. Jend. A. Yani No. 1 Kel. Rano

## KATA PENGANTAR

### ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus merupakan bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang, bahwa Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021-2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Muara Sabak, 20 Januari 2025

Sekretaris Daerah,



H. SAPRIL, S.IP.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Dasar Hukum .....	3
1.4 Struktur Organisasi .....	5
1.5 Sumber Daya Aparatur .....	8
1.6 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 Rencana Strategis .....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah .....	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	12
2.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	14
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	18
2.4 Rencana Aksi .....	24
2.5 Perjanjian Kinerja Anggaran Perubahan Tahun 2024 .....	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
3.1 Capaian Kinerja .....	37
3.2 Realisasi Anggaran .....	54
BAB IV PENUTUP .....	57
4.1 Kesimpulan .....	57
4.2 Rekomendasi .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Seiring dengan semangat reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* sebagai syarat bagi pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*), memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Untuk mencapai hal tersebut maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja yang mewajibkan unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategis yang

ditetapkan dan penyusunannya telah diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang bertugas menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah berusaha untuk melakukan pembenahan diri sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan masyarakat terhadap terciptanya *Good Governance*. Oleh karena itu, sebagai perwujudan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, maka disusunlah Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 yang akan mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Sekretariat Daerah.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkisanambungan bagi Sekretariat Daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 adalah memberi arah dan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggungjawab antar Bagian, memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah :

- a. Membangun Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip

- kepemerintahan yang baik dan profesional dalam pelayanan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh Bagian, dan memberikan contoh kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - c. Menjadi acuan utama dalam penyusunan kegiatan Bagian;
  - d. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai akumulasi dan kinerja Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.3 DASAR HUKUM**

1. Idiil : Pancasila
2. Konstitusional : UUD 1945
3. Operasional :
  - a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - g. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2021);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2024;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2024;
- m. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024;
- n. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2024;

## 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kesempatan luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan aspirasi dan inspirasi masyarakat.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menegaskan adanya momentum otonomi daerah serta semangat reformasi, yang secara tidak langsung membawa pengaruh dalam penataan pemerintah pada umumnya dan penataan organisasi perangkat daerah, kemampuan keuangan daerah, serta ketersediaan sumber daya aparatur yang penjabarannya dituangkan kedalam bentuk Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah terdiri atas :

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
    3. Bagian Hukum terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
    1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas kelompok jabatan fungsional;
    2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional; dan
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.
  - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
    1. Bagian Umum, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
    2. Bagian Organisasi, terdiri atas kelompok jabatan fungsional
    3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas :

- a) Sub Bagian Protokol; dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

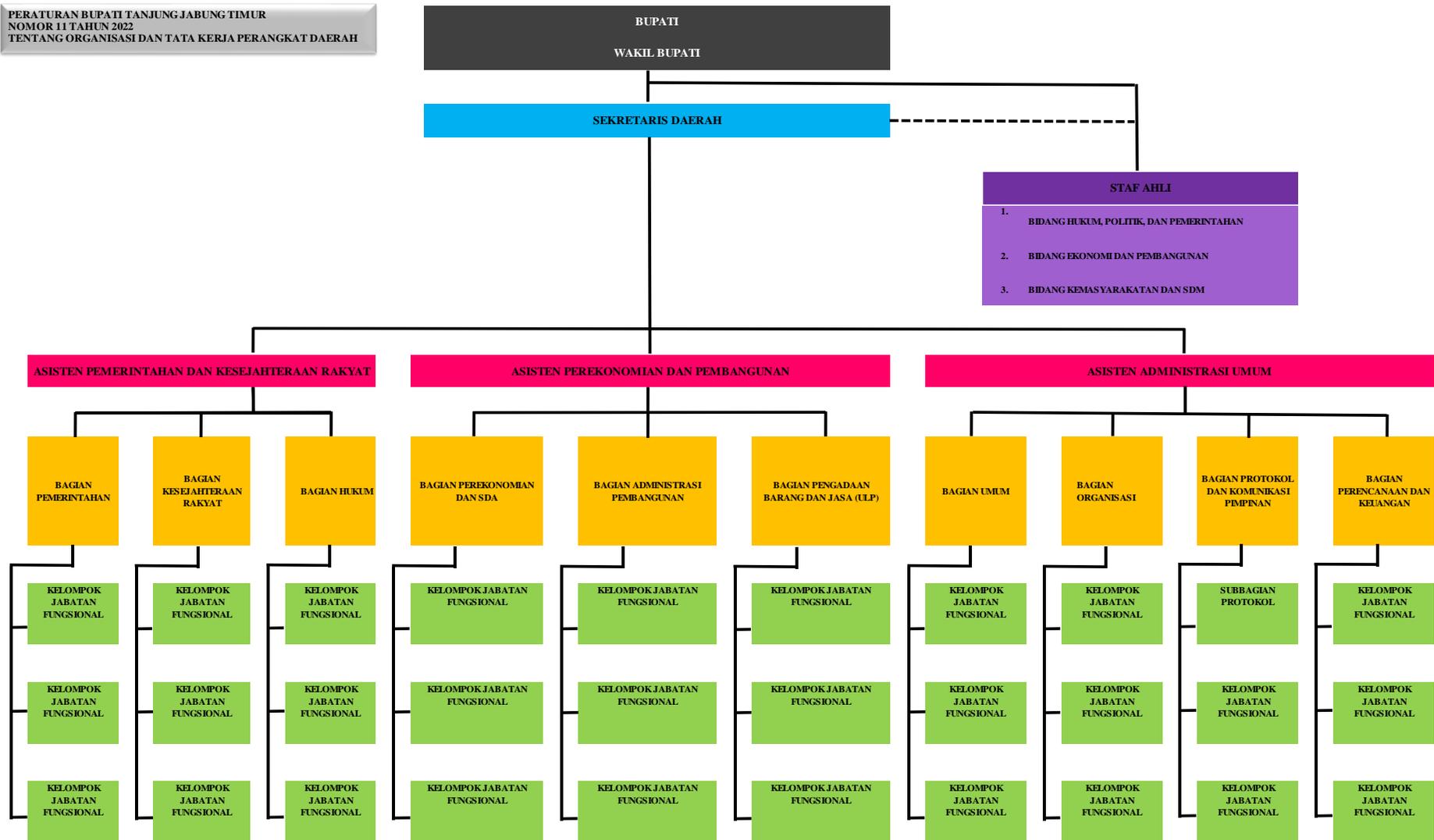
d. Staf Ahli Bupati terdiri dari :

- 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan;
- 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;

Untuk lebih jelas Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dapat dilihat pada skema gambar 1.1. berikut ini :

## STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2022  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH



## 1.5 SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur merupakan aset utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi, selain metode anggaran dan sarana/prasarana. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia, karena manusia sebagai sumber daya aparatur merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Tanpa didukung dengan kinerja yang baik dan tinggi dari aparatur. Suatu organisasi akan menjalani kesulitan dalam proses pencapaian tujuannya begitu pula halnya dengan peningkatan profesionalisme aparatur untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang handal dan berkompeten dalam bidangnya.

Keadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan 31 Desember 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 92 orang Pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil dengan Jumlah 92 Orang
  - a) Dari segi kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari :
    - Golongan I : -
    - Golongan II : 8
    - Golongan III : 66
    - Golongan IV : 18
  - b) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :
    - S2 : 7 Orang
    - S1 : 67 Orang
    - D3 : 4
    - SLMA : 12
    - SLTP : 2
    - SD : -
  - c) Dari segi Jabatan Struktur/Eselon adalah sebagai berikut :
    - Eselon II : 7
    - Eselon III : 10
    - Eselon IV : 1
    - Fungsional : 28

## 2. Tenaga Honorer dengan Jumlah 124 Orang

Dengan rincian sebagai berikut :

- Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran : 70 Orang
  - Tenaga Pelayanan Umum : 21 Orang
  - Tenaga Kebersihan : 13 Orang
  - Tenaga Keamanan : 3 Orang
  - Sopir : 8 Orang
  - Petugas Syara Masjid : 9 Orang
3. Staf Ahli Bupati berjumlah : 3 Orang

### 1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut, diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance plan*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini, akan memungkinkan diidentifikasikannya celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam berikut ini :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat kondisi umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kelembagaan, isue strategis, dan permasalahan pembangunan, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, landasan penyusunan serta sistematika penyusunan.

**Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 2021 – 2026, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat tentang rencana strategis, visi-misi dan kebijakan umum serta Rencana Kinerja Tahun 2024.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja Tahun 2024 termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala,

dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisiensi.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi, Kebijakan dan Program yang akan dicapai. RENSTRA juga berguna sebagai pedoman atau acuan bagi Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku unsur staf, membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang baik (good governance).

##### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

**Visi** Kabupaten Tanjung Jabung Timur tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### **“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” (MERAKYAT)**

Penjabaran Visi di atas adalah mencerminkan kepribadian seorang pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, tidak eksklusif, peduli dengan permasalahan rakyat, sehingga dapat mengetahui dan memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani, karena pada hakekatnya pemimpin itu adalah pelayan masyarakat.

**Misi** Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka mengimplementasikan Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Upaya yang maksimal untuk mewujudkan Visi **“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”** Sekretariat Daerah termuat dalam Misi 4 hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang sejahtera bertumpu pada sektor pertanian dan perikanan.

2. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing.
3. Meningkatkan investasi daerah yang kompetitif dan lestari.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan yang ingin dicapai melalui 4 misi diatas, perlu ditetapkan kebijakan pembangunan yang akan menjadi agenda prioritas, yaitu : Misi nomor 4 (empat) **“Mewujudkan reformasi birokrasi guna peningkatan pelayanan publik dalam tatanan kehidupan yang nyaman dan harmonis”**

### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan pada umumnya setelah penetapan Visi dan Misi dan tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur
2. Terwujudnya Koordinaasi Pemerintahan Kabupaten

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek. Adapun sasaran Sekretariat Daerah :

1. Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
2. Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Pemerintahan
3. Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Perekonomian dan Pembangunan
4. Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Administrasi Umum

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah**  
**Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Formula	Kondisi Kinerja Awal	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-						Sumber Data	Penanggung Jawab		
							2021	2022	2023	2024	2025	2026				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O		
1	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey	NA	78	82	86	90	94	98	Surver Menurut Permenpan No. 14	Kepala OPD/Sekretariat	
				2	Predikat AKIP OPD	Penilaian Inspektorat	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	Dokumen Renstra, Renja, DPA, LKJIP	Kepala OPD/Sekretariat	
				3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Penilaian Bakeuda	NA	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Laporan Keuangan Calk, LRA, Neraca, LO, LPE	Kepala OPD/Sekretariat	
2	Terwujudnya Koordinaasi Pemerintahan Kabupaten	persentase koordinasi pelaksanaan program di Kabupaten	1	Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Pemerintahan	1	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan	jumlah prog yang dilaksanakan / jumlah program tahun n *100 (jumlah program dari program pemerintahan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi Fisik dan Keuangan Setda	Kepala OPD/Sekretariat	
			2	Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Perekonomian dan Pembangunan	2	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang perekonomian dan pembangunan	jumlah prog yang dilaksanakan / jumlah program tahun n *100 (jumlah program dari program perekonomian dan pembangunan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi Fisik dan Keuangan Setda	Kepala OPD/Sekretariat
			3	Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Administrasi Umum	3	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang administrasi umum	jumlah prog yang dilaksanakan / jumlah program tahun n *100 (jumlah program dari program administrasi Umum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Realisasi Fisik dan Keuangan Setda	Kepala OPD/Sekretariat

## 2.2 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dari tujuan dan sasaran strategik yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang menggambarkan suatu keberhasilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (RENJA). Penetapan strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Untuk mencapai sasaran-sasaran diatas maka program Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

Penetapan Kebijakan, Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
<b>Masyarakat Pemilik Tanah</b>	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1. Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
<b>Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan</b>	2. Penunjang dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

			12. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 14. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 16. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah	17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 21. Fasilitas Kunjungan Tamu 22. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24. Pengadaan Mebel 25. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
		8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		9. Pemeliharaan Barang Milik	30. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<p>Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas</p> <p>31. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <p>32. Pemeliharaan Mebel</p> <p>33. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>34. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>35. Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>36. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>37. Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
		10. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	<p>38. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>39. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>40. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>
		11. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	<p>41. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</p> <p>42. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah</p> <p>43. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</p>
		12. Penataan Organisasi	<p>44. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</p> <p>45. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</p> <p>46. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</p>

			47. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 48. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
		13. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	49. Fasilitasi Keprotokolan 50. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 51. Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum	3. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14. Administrasi Tata Pemerintahan	52. Penataan Administrasi Pemerintahan 53. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 54. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
		15. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	55. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 56. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 57. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
		16. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	58. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 59. Fasilitasi Bantuan Hukum 60. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan	4. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	17. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	61. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 62. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 63. Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
		18. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	64. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

			65. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 66. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
		19. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	67. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 68. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 69. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
		20. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	70. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 71. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 72. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

### 2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah menyusun kinerja tahunan yang disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan.

**Tabel 2.3**  
Rencana Kinerja Tahunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan						
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>Meningkatkan Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas Meningkatkan Kelembagaan dan Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatkan Birokrasi yang Tangguh, Terampil dan Berintegritas Meningkatkan Kelembagaan dan Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>	<b>Penunjang dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>							
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80 Dok						
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dok						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dok						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Kali						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Kali						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Kali						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Kali						
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	2 Kali						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Lap						
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dok						
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dok						
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	263 Stel						
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54 Diklat 12kali						

		Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 jenis 71 jenis 33 jenis					
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Jenis					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8 Jenis					
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Kali					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Kali					
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Jenis					
		Pengadaan Mebel	6 Jenis					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 jenis 5 jenis					
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2 jenis					
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Kali					
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Kali					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11 Kali					
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	71 Unit 12 kali					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16 Unit					
		Pemeliharaan Mebel	12 kali					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 kali					
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12 kali					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 unit 12 kali					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun					

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 stel	28 stel	28 stel	28 stel	28 stel	28 stel
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln	2 org/bln
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali
		Penataan Organisasi						
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 dok 6 dok	1 dok 6 dok	1 dok 6 dok	1 dok 6 dok	1 dok 6 dok	1 dok 6 dok
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	43 opd 10 opd	43 pd 10 opd	43 opd 10 opd	43 opd 10 opd	43 opd 10 opd	43 opd 10 opd
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok	1 dok 1 dok
		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	43 opd	43 opd	43 opd	43 opd	43 opd	43 opd
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
		Fasilitasi Keprotokolanan	80 keg	80 keg	80 keg	80 keg	80 keg	80 keg
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	36 keg	36 keg	36 keg	36 keg	36 keg	36 keg
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg	4 keg
Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Kesejahteraan Rakyat	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>						
		Administrasi Pemerintahan						
		Penataan Administrasi Pemerintahan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						

		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 juara umum 1 juara 2 8 kali 100% 100% 11 kecamatan 100% 100% 70 orang	1 juara umum 1 juara 2 8 kali 100% 100% 11 kecamatan 100% 100% 70 orang	1 juara umum 1 juara 2 8 kali 100% 100% 11 kecamatan 100% 100% 70 orang	1 juara umum 1 juara 2 8 kali 100% 100% 11 kecamatan 100% 100% 70 orang	1 juara umum 1 juara 2 8 kali 100% 100% 11 kecamatan 100% 100% 70 orang	1 juara umum 1 juara 2 8 kali 100% 100% 11 kecamatan 100% 100% 70 orang
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	4 dok					
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1 BKMT kab 8 org					
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4 dok					
		Fasilitasi Bantuan Hukum	2 perkara					
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	5 dok					
Terkendalinya laju inflasi	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian & Pembangunan	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>						
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dok					
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 dok					
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	3 dok					
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	2 dok					
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	1 dok					
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 dok					
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4 dok					
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						

		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12 dok					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	12 dok					
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	12 dok	12				

## 2.4 RENCANA AKSI

Rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tertuang pada tabel dibawah ini :

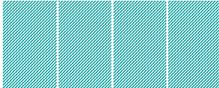
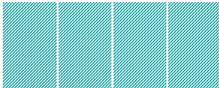
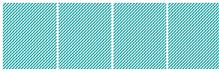
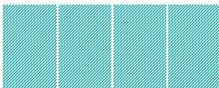
**Tabel 2.4**

Rencana Aksi Sekretariat Daerah Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	AKSI/ KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN				TARGET OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)
					TRI I	TRI II	TRI III	TRI IV						
1	2	3	4	5	6				7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Layanan Terhadap Setda)	90								PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			10.000.000
				Melaksanakan Rapat Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					100%	Bagian Pemerintahan		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Rapat Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
									5 Dok			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan	100%								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			34.174.263.204
				Melaksanakan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah					100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	489.090.800

								4 Dok		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	263.845.800
								80 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000
								1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.445.000
								1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	12.000.000
								1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13.800.000
								12 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.000.000
		Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Melaksanakan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.182.062.598
								#####		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12.962.010.882
								12 Dok		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	979.536.083
								4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.000.000

									2 Dok			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1.500.000
									6 Laporan			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	230.015.633
								100%	Bagian Umum			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	27.300.000
									5 Dok			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	16.500.000
									8 Laporan			Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.800.000
								100%	Bagian Umum			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	207.750.000
									263 Paket			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	139.750.000
									54 Orang			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	68.000.000
								100%	Bagian Umum			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.791.911.210

	7 Paket	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80.575.000
	7 Paket	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	212.475.820
	15 Paket	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	31.170.000
	8 Paket	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	124.870.390
	12 Laporan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.862.820.000
	12 Laporan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.480.000.000

				Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100%	Bagian Umum		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.035.103.153
--	--	--	--	---	--	--	--	------	-------------	--	--	--	---------------

	1 Unit	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	801.800.000
	6 Unit	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	334.050.000
	12 Unit	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1.872.453.153
	2 Unit	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	26.800.000

				Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	Bagian Umum		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.174.270.000
									12 Laporan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.133.280.000
									12 Laporan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.052.190.000
									11 Laporan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.988.800.000
				Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					100%	Bagian Umum		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.608.398.000
									71 Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1.085.748.000
									1 Unit			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	881.200.000
									12 Unit			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	35.000.000
									12 Unit			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	308.400.000
									12 Unit			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	120.000.000

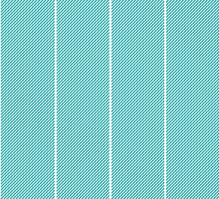
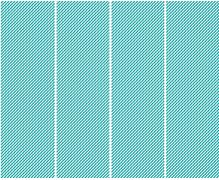
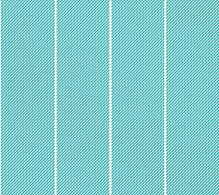
								6 Unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.061.400.000
								1 Unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	687.150.000
								1 Unit			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	429.500.000
				Melaksanakan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100%	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	691.328.630
								#####			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	199.328.630
								28 Paket			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	92.000.000
								#####			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000
				Melaksanakan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				100%	Bagian Umum		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.526.236.043

									12 Paket		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	700.402.785
									12 Paket		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	415.356.056
									12 Paket		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	410.477.202
				<b>Melaksanakan Penataan Organisasi</b>					<b>100%</b>	<b>Bagian Organisasi</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>574.762.770</b>
		Indeks Kelembagaan	Sesuai						1 Dok		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	224.100.367
									43 Laporan		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	39.962.008
									2 Dok		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	33.807.536
		Indeks Pelayanan Publik	B						43 Dok		Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	31.305.680
		Predikat AKIP OPD	BB						1 Dok		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	245.587.179
				<b>Melaksanakan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>					<b>100%</b>	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>866.050.000</b>
									80 Laporan		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	358.840.000
									36 Laporan		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	341.000.000

									4 Laporan		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	166.210.000
			100%								<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>6.590.177.009</b>
				Melaksanakan Administrasi Tata Pemerintahan					100%	Bagian Pemerintahan	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	904.668.755
									2 Dok		Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	380.525.414
									2 Dok		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	244.583.295
									1 Dok		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	279.560.046
				Melaksanakan Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					100%	Bagian Kesra	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.041.510.028
									6 Dok		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.639.010.337
									1 Dok		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	107.499.960

									2 Dok		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	294.999.731
		<b>Indeks Reformasi Hukum</b>	<b>90</b>	<b>Melaksanakan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>				<b>100%</b>	<b>Bagian Hukum</b>		<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>643.998.226</b>
									4 Dok		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	89.938.540
									2 Kasus		Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	443.394.736
									5 Dok		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	110.664.950
	<b>Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang perekonomian dan pembangunan</b>	<b>100%</b>								<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>		<b>2.800.301.381</b>
				<b>Melaksanakan Kegiatan Kebijakan Perekonomian</b>				<b>100%</b>	<b>Bagian Perekonomian dan SDA</b>		<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>331.724.435</b>
									2 Dok		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	121.044.744
									3 Laporan		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	118.673.892

								3 Dok			Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	92.005.799
				Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100%	Bagian Pembangunan		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	672.030.019
								2 Dok			Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	188.518.944
								1 Laporan			Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.164.497
								2 Laporan			Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	396.346.578
				Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.593.761.835
								100 Dok			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	970.774.906
								100 Dok			Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	223.659.923
								4 Orang			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	399.327.006
				Melaksanakan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				100%	Bagian Perekonomian dan SDA		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	202.785.092

	1 Dok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	76.809.380
	1 Dok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	46.134.489
	1 Dok	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	79.841.223

Rencana aksi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 terdiri dari 4 sasaran strategis, 4 indikator kinerja yaitu Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan target nilai 97 dan Akuntabilitas Kinerja (AKIP) dengan target nilai 74 / BB dan laporan keuangan sesuai (SAP) dengan target nilai sesuai. Program kegiatan dan sub kegiatan terdiri dari 4 Program 20 kegiatan dan 72 Sub Kegiatan.

## 2.5 PERJANJIAN KINERJA ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 terdiri dari :

No	Sasaran Strategis		Indikator sasaran		Target		
1	2		3		4		
1	1	Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90		
			2	Predikat AKIP OPD	BB		
			3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai		
2	1	Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Pemerintahan	1	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan	100%		
			2	Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Perekonomian dan Pembangunan	2	persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang perekonomian dan pembangunan	100%
					3	Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Administrasi Umum	3

Jumlah APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp **43.574.741.594** yang terdiri dari :

1.	Belanja Pegawai Sebesar	Rp	14.186.899.512
2.	Belanja Barang dan Jasa Sebesar	Rp	25.057.038.929
3.	Belanja Hibah Sebesar	Rp	1.450.000.000
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar	Rp	2.332.803.153
5.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar	Rp	253.000.000
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	295.000.000

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 10.000.000	APBDP
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.174.263.204	APBDP
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.590.177.009	APBDP
4.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.800.301.381	APBDP

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, maupun hasil yang dicapai.

Bab ini menyajikan penjabaran mengenai tingkat pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama satu tahun anggaran, berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana target kinerja telah berhasil dicapai.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja yang diperoleh dibandingkan dengan target yang telah ditentukan, kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Analisis ini penting sebagai bahan evaluasi guna menyusun strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memahami bahwa akuntabilitas bukan hanya sebatas laporan administratif, tetapi merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kepada masyarakat. Oleh karena itu, seluruh capaian kinerja, baik yang berhasil maupun yang belum tercapai, disampaikan secara terbuka dalam laporan ini sebagai wujud transparansi dan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui bab ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki maupun dipertahankan. Dengan demikian, langkah-langkah perbaikan yang dirumuskan ke depan dapat disusun secara lebih tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan yang mungkin dihadapi di masa mendatang.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sangat ditentukan oleh bagaimana capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dilaksanakan dalam satu kurun waktu tertentu. Perbandingan antara capaian kinerja dan anggaran dengan target perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) menjadi indikator utama dalam menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja yang diberikan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja disajikan menurut kelompok indikator utama dan capaian sasaran secara keseluruhan terhadap indikator utama dengan mencakup sasaran. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian kinerja tidak terlepas dari komitmen dari masing-masing Bagian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran Kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 mengatur tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja seperti berikut:

#### 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

**Tabel 3.1.1**  
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Target	Realisasi
1	2	3	4	5
1	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	97
		2 Predikat AKIP OPD	BB (70-80)	BB (72,31)
		3 Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)
2	1 Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan	1 persentase koordinasi pelaksanaan program di Bidang Pemerintahan	100%	99%

2	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	2	persentase koordinasi pelaksanaan program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	98%
3	Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum	3	persentase koordinasi pelaksanaan program di Bidang administrasi umum	100%	98%

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah. Nilai IKM dihitung dari hasil rata-rata penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur layanan (9 unsur). Skor akhir kemudian dikonversi ke skala 0–100. Pada tahun 2024, target IKM ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 90, dan memperoleh hasil realisasi mencapai angka 97 atau rata-rata skor dari seluruh pertanyaan adalah 3,88. Pencapaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan dalam mutu layanan, baik dari sisi kecepatan pelayanan, kejelasan prosedur, maupun sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Hal ini juga menunjukkan bahwa program-program peningkatan pelayanan publik yang telah dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Keberhasilan ini patut dipertahankan dan ditingkatkan, dengan tetap memperhatikan aspek kepuasan pengguna layanan sebagai tolak ukur utama.
2. AKIP adalah hasil evaluasi yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai faktor obyektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP. Komponen komponen tersebut kemudian dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan tingkat AKIP, dengan kategori predikat yang di atur dalam Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**  
Kategori Penilaian AKIP

Kategori	Range Nilai	Keterangan
AA	90 – 100	Sangat memuaskan
A	80 – 90	Memuaskan
BB	<b>70 – 80</b>	<b>Sangat Baik</b>
B	60 – 70	Baik
CC	50 – 60	Cukup
C	30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Untuk target indikator ini berada pada kisaran nilai predikat BB (70–80), dan realisasi predikat AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Timur berada pada level BB yang menggambarkan bahwa sistem pengelolaan kinerja sudah berjalan dengan baik, di mana perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dilakukan secara konsisten dan akuntabel. Meskipun belum mengalami peningkatan ke level yang lebih tinggi (seperti A), capaian ini tetap menunjukkan komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk mencapai predikat yang lebih tinggi di masa depan, perlu dilakukan penguatan peran pengawasan internal dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja.

3. Indikator "Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)" merupakan parameter penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, dan hasil realisasi menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun “Sesuai” dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, capaian indikator ini mencapai 100%, capaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang optimal terhadap regulasi akuntansi pemerintah. Untuk pengukuran dilakukan melalui:
  - a) Opini BPK

**Tabel 3.1.3**  
Opini BPK

Opini BPK	Keterangan
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Sangat baik, sesuai SAP
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	Ada kekurangan, tapi masih wajar
TW (Tidak Wajar)	Banyak kesalahan, tidak wajar
TMP (Tidak Memberikan Pendapat)	BPK tidak bisa menyimpulkan

b.) Kesesuaian dengan SAP

Apakah laporan keuangan memenuhi prinsip SAP:

1. AkruaI basis
2. Lengkap (neraca, LO, LRA, LPE, CaLK, dsb.)
3. Konsistensi dan keterbandingan
4. Diuji melalui review internal dan eksterna

b) Ketepatan Waktu dan Kualitas Penyusunan

1. Laporan disusun tepat waktu
2. Bebas dari kesalahan material
3. Didukung oleh sistem pencatatan (SIPD)

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan:

1. Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan program di Bidang Pemerintahan menunjukkan capaian yang sangat tinggi, yaitu sebesar 99% dari target 100%. Angka ini mencerminkan bahwa hampir seluruh kegiatan koordinatif antar instansi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Selain itu, ini juga mencerminkan responsivitas dan keterlibatan aktif dari seluruh stakeholder yang terlibat. Meskipun capaian koordinasi di Bidang Pemerintahan hampir mencapai target penuh, masih terdapat kekurangan sebesar 1%. Salah satu dari penyebabnya adalah adanya penyesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan yang lebih sedikit dari yang diperkirakan.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan:

1. Realisasi Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan sang pada tahun 2024 mencapai 98%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar proses koordinatif dalam pelaksanaan program lintas sektor telah dilaksanakan secara maksimal. Meskipun ada kekurangan 2% salah satu penyebabnya yakni adanya beberapa kegiatan yang bersifat insidental meskipun telah dianggarkan dan terdapat kendala terkait SDM pada kerja sama antar-OPD, di mana beberapa personel tidak memiliki latar belakang keahlian yang sesuai, sehingga mengurangi efektivitas pelaksanaan koordinasi secara keseluruhan.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum:

1. Realisasi koordinasi di bidang administrasi umum yang mencapai 98% menunjukkan bahwa hampir semua proses koordinatif dalam pengelolaan tata usaha, kepegawaian, dan pelayanan administratif telah dilaksanakan secara maksimal. Namun demikian, masih terdapat deviasi sebesar 2% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya terjadinya fluktuasi harga barang dan jasa dan pergeseran alokasi anggaran ke kegiatan yang bersifat lebih mendesak atau prioritas, sehingga beberapa kegiatan koordinatif administratif harus ditunda atau disesuaikan skala pelaksanaannya.

**3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

**Tabel 3.1.4**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	KKA	Target			Realisasi			Capaian (%)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	82	86	90	82	88	97	100%	102%	108%
2	Predikat AKIP OPD	CC	B (60-70)	BB (70-80)	BB (70-80)	B (65,03)	BB (70,16)	BB (72,31)	100%	100%	100%
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	NA	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	100%	100%	100%
4	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
5	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
6	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan:

1. Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian menunjukkan tren positif yang signifikan. Pada tahun 2022, target IKM ditetapkan sebesar 82 dan berhasil direalisasikan sesuai target, yakni 82 (100% capaian). Peningkatan mulai terlihat pada tahun 2023, di mana target sebesar 86 mampu dilampaui dengan realisasi mencapai 88 (102% capaian). Puncaknya terjadi di tahun 2024, di mana dari target sebesar 90, realisasi mencapai 97 (108% capaian). Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus meningkat. Capaian yang melebihi target juga menjadi indikasi bahwa kegiatan pembinaan dan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilakukan secara berkala berjalan secara efektif.
2. Indikator Predikat AKIP OPD, juga mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Capaian predikat AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahun. Tahun 2022 memperoleh nilai B (65,03), kemudian meningkat menjadi BB (70,16) di tahun 2023 dan BB (72,31) di tahun 2024. Peningkatan nilai AKIP ini mencerminkan bahwa mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin terstruktur, terukur, dan berbasis akuntabilitas. Keberhasilan capaian ini tidak lepas dari peran strategis program peningkatan kapasitas aparatur serta dukungan administrasi yang kuat, yang menjadi fondasi utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab.
3. Indikator Laporan Keuangan Sesuai SAP, konsistensi terjaga dengan realisasi “Sesuai” selama tiga tahun berturut-turut (2022 sampai 2024). Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan patuh terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Capaian ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas anggaran, serta mendukung perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

#### Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan:

1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan selama tiga tahun berturut-turut mencapai 99% dari target 100%. Angka ini menunjukkan keberhasilan besar dalam menjalin sinergi antar-instansi terkait urusan pemerintahan, serta tingginya responsivitas dan partisipasi para pemangku kepentingan. Namun, capaian ini masih menyisakan deviasi kecil sebesar 1%. Salah satu penyebabnya adalah adanya penyesuaian dengan kebutuhan riil di lapangan. dengan kata lain meskipun kegiatan tetap dirancang, secara aktual tidak seluruhnya diperlukan atau dijalankan, dan ini berdampak pada catatan capaian.

#### Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan:

1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan mencapai realisasi stabil di angka 98% selama tiga tahun berturut. Capaian ini belum mencapai target 100% seperti yang ditetapkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kegiatan yang bersifat insidental, yaitu kegiatan yang pelaksanaannya sangat bergantung pada situasi dan kebutuhan di lapangan. Meskipun telah dianggarkan, tidak semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena tidak selalu dibutuhkan secara rutin. Di samping itu, tantangan lain muncul dari sisi sumber daya manusia. Beberapa personel yang terlibat dalam kerja sama antar-OPD tidak memiliki latar belakang keahlian yang sesuai dengan substansi program yang dikoordinasikan. Hal ini turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan koordinasi, terutama dalam menyatukan langkah antar instansi teknis.

#### Strategis 4: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum:

1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum mencapai realisasi stabil di angka 98% selama tiga tahun berturut. Namun, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa capaian ini belum mencapai angka sempurna. Salah satunya adalah terjadinya fluktuasi harga barang dan jasa yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan kegiatan di lapangan. Ada beberapa alokasi anggaran harus digeser ke kegiatan lain yang bersifat lebih mendesak atau memiliki prioritas lebih tinggi. Meskipun begitu, stabilitas capaian di angka 98% menunjukkan bahwa sistem koordinasi di bidang administrasi umum telah berjalan baik dan responsif terhadap perubahan kondisi.

### 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

**Tabel 3.1.5**

Perbandingan Realisasi Kinerja Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No.	Indikator Kinerja	KKA	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA	78	82	86	90	94	98	78	82	86	97	-	-
2	Predikat AKIP OPD	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	B	B	BB	BB	-	-
3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	NA	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	-	-
4	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	99%	99%	99%	-	-
5	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	84%	98%	98%	98%	-	-
6	Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	98%	98%	98%	-	-

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami tren capaian yang sangat positif. Sejak tahun 2021 hingga 2024, capaian selalu memenuhi bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, di mana IKM mencapai angka 97, jauh melampaui target tahun tersebut yang sebesar 90. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan publik yang signifikan, baik dari sisi responsivitas maupun aksesibilitas layanan.
2. Predikat AKIP OPD menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan. Dari awalnya hanya meraih nilai B di tahun 2021 dan 2022, capaian meningkat menjadi BB pada 2023 dan dipertahankan hingga 2024. Artinya, perangkat daerah berhasil mencapai target akuntabilitas sesuai dengan rencana, bahkan lebih cepat satu tahun dari target Renstra yang menetapkan BB mulai 2024. Ini menandakan adanya peningkatan nyata dalam manajemen kinerja dan pengendalian internal.

3. Laporan Keuangan Sesuai SAP menunjukkan konsistensi capaian 100% sejak tahun 2021 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi, serta memenuhi standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan:

1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan selama periode 2021 hingga 2024, menunjukkan tren perbaikan. Meskipun target Renstra ditetapkan sebesar 100% setiap tahun, realisasi pada 2021 tercatat sebesar 94%, lalu meningkat menjadi 99% dari tahun 2022 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan program pemerintahan semakin optimal, meski masih terdapat sedikit ruang untuk perbaikan dalam mencapai kesempurnaan pelaksanaan di lapangan.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan:

1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program Di Bidang Perekonomian dan Pembangunan menunjukkan perbaikan signifikan. Setelah berada di angka 84% pada tahun 2021, realisasi meningkat menjadi 98% pada tiga tahun berikutnya. Kendati belum mencapai target penuh, angka tersebut menunjukkan bahwa upaya koordinasi antar sektor pembangunan dan perekonomian telah berlangsung secara lebih terstruktur dan konsisten, meskipun masih dihadapkan pada tantangan teknis di lapangan.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum:

1. Persentase Koordinasi Administrasi Umum juga mengalami peningkatan yang stabil. Dari capaian 96% pada 2021, angka tersebut naik menjadi 98% dan bertahan hingga 2024. Meskipun masih sedikit di bawah target Renstra sebesar 100%, capaian ini tergolong tinggi dan memberikan dampak nyata terhadap efisiensi pelaksanaan program-program di Bidang Administarsi Umum.

### **3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Realisasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 telah diselaraskan dengan kebijakan dan standar nasional yang berlaku. Meskipun Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak menjalankan fungsi pelayanan dasar secara langsung, pengukuran kinerjanya tetap dapat dibandingkan dengan standar nasional melalui beberapa indikator umum seperti berikut:

1. Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang diperoleh merupakan representasi kontribusi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang efektif dan efisien. Pencapaian predikat SAKIP tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah telah menjalankan fungsi manajemen kinerja sesuai prinsip akuntabilitas yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Pengelolaan keuangan, laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berperan dalam memastikan kelengkapan dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan tepat waktu, sehingga turut menjaga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana menjadi indikator kinerja tata kelola keuangan yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Pengukuran IKM oleh Sekretariat Daerah menunjukkan tingkat kepuasan yang baik terhadap layanan yang diberikan. Hal ini mencerminkan birokrasi yang responsif dan akuntabel. Proses pengukuran mengacu pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 sebagai standar pelaksanaannya..

Dengan demikian, kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 tidak hanya memenuhi target kinerja internal, tetapi juga telah menunjukkan kesesuaian dengan standar kinerja nasional melalui capaian nilai SAKIP, kepatuhan terhadap SAP, dan kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan yang diberikan.

**3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan**

**Tabel 3.1.6**  
Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>	<b>Keberhasilan/Kegagalan</b>	<b>Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan</b>
<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	90	97	108%	Capaian berhasil dan melampaui target	Peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem pengaduan publik, dan digitalisasi proses layanan
<b>Predikat AKIP OPD</b>	BB (70-80)	BB (72,31)	100%	Capaian sesuai target rentang	Evaluasi berkala pelaksanaan SAKIP, peningkatan integrasi perencanaan dan pelaporan kinerja
<b>Laporan Keuangan Sesuai SAP</b>	Sesuai (100%)	Sesuai (100%)	100%	Capaian berhasil seluruh laporan sesuai standar	Penguatan kapasitas SDM pelaporan keuangan
<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan</b>	100%	99%	99%	Koordinasi pelaksanaan program di Bidang Pemerintahan telah berjalan baik dengan efektivitas tinggi, meskipun masih terdapat deviasi kecil akibat penyesuaian kegiatan di lapangan.	Pendekatan melalui forum koordinasi lintas sektor, pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin, pembentukan tim kerja bersama, dan monitoring kinerja secara berkala juga menjadi strategi yang cukup efektif.
<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	100%	98%	98%	Pelaksanaan koordinasi program dalam Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdapat deviasi kecil karena adanya kegiatan insidental dan kendala pada kesesuaian SDM antar-OPD.	Pemanfaatan forum komunikasi pembangunan daerah, penguatan regulasi pendukung, peningkatan kapasitas SDM teknis, serta pemantauan pelaksanaan program melalui sistem informasi pembangunan.

<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum</b>	100%	98%	98%	Capaian koordinasi program di Bidang Administrasi Umum meskipun belum mencapai target 100%. Hal ini disebabkan oleh pergeseran anggaran serta fluktuasi kebutuhan operasional.	Penyesuaian rencana kerja dengan skala prioritas, rasionalisasi kegiatan administratif yang tidak mendesak, serta penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan riil.
--	------	-----	-----	--	---

### 3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

LKjIP memberikan informasi mengenai upaya dan besaran efisiensi sumber daya seperti besaran efisiensi anggaran dengan perhitungan sebagai berikut:

$$E = (100) \frac{(\text{Realisasi Anggaran})}{(\text{Target Anggaran})} \times 100\%$$

**Tabel 3.1.7**  
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran		Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	97	108%	-	-	-
Predikat AKIP OPD	BB	BB	100%	-	-	-
Laporan Keuangan Sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	100%	-	-	-
Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan	100%	99%	99%	Rp34.184.263.204	Rp32.796.040.811	96%
Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	98%	98%	Rp6.590.177.009	Rp6.469.847.819	98%

<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum</b>	100%	98%	98%	Rp2.800.301.381	Rp2.673.877.588	95%
--	------	-----	-----	-----------------	-----------------	-----

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tidak terdapat alokasi anggaran secara langsung yang dikaitkan dengan capaian IKM. Ini dapat disebabkan karena kegiatan survei dan pengukuran IKM dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas rutin yang biayanya tidak dibebankan secara eksplisit, atau sudah termasuk dalam kegiatan lain yang tidak terpisah. Proses pengukuran IKM biasanya dilaksanakan secara internal oleh perangkat daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang telah ada, seperti pegawai dan instrumen survei yang sederhana atau digital, sehingga tidak memerlukan pembiayaan terpisah.

2. Predikat AKIP OPD

Predikat AKIP merupakan hasil dari proses internalisasi sistem kinerja, pelaporan, dan pengawasan, yang tidak memiliki anggaran khusus. Hal ini terjadi karena predikat AKIP merupakan hasil evaluasi kinerja keseluruhan organisasi yang dinilai oleh pihak eksternal (seperti inspektorat atau Kemenpan-RB), dan pencapaiannya lebih dipengaruhi oleh pelaksanaan manajemen kinerja yang baik daripada program atau kegiatan tertentu yang memerlukan anggaran langsung. Dengan kata lain, keberhasilan ini merupakan hasil akumulasi kinerja OPD yang dibiayai melalui anggaran program-program reguler, bukan dari satu kegiatan spesifik.

3. Laporan Keuangan Sesuai SAP

Penyusunan laporan keuangan sesuai SAP merupakan kewajiban administratif yang pelaksanaannya terintegrasi dalam fungsi rutin dan merupakan hasil dari sistem pelaporan dan tata kelola keuangan yang dijalankan oleh internal OPD, khususnya unit akuntansi dan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga tidak dipisahkan sebagai kegiatan tersendiri yang membutuhkan anggaran terukur dalam laporan.

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan:

1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan terjadi efisiensi sebesar 4% dari anggaran yang direncanakan tanpa mengurangi capaian target 100%. Tingkat efisiensinya mencerminkan penggunaan anggaran yang cukup optimal.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan:

2. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan memiliki efisiensi sebesar 2% dari anggaran yang direncanakan tanpa mengurangi capaian target 100%. Tingkat efisiensinya mencerminkan penggunaan anggaran yang cukup optimal.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum:

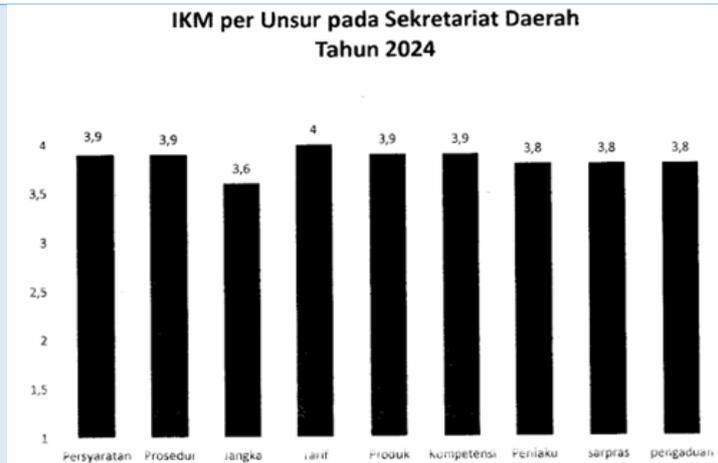
1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum memiliki efisiensi sebesar 5% dicapai tanpa mempengaruhi tingkat capaian kinerja yang tetap 100%. Tingkat efisiensinya mencerminkan penggunaan anggaran yang cukup optimal.

### 3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran Strategis 1: Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

**Tabel 3.1.8**  
Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Hasil	Kegiatan																																								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Nilai Unsur Pelayanan</th> </tr> <tr> <th>IKM per unsur</th> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,6</td> <td>4</td> <td>3,9</td> <td>3,9</td> <td>3,8</td> <td>3,8</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <th>Kategori</th> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> <td>A</td> </tr> <tr> <th>IKM Unit Layanan</th> <td colspan="9">97 (A atau Sangat Baik)</td> </tr> </thead> </table>	Nilai Unsur Pelayanan										IKM per unsur	3,9	3,9	3,6	4	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A	IKM Unit Layanan	97 (A atau Sangat Baik)									Survei Kepuasan Masyarakat Selama satu periode (Januari-Desember 2024)
	Nilai Unsur Pelayanan																																									
	IKM per unsur	3,9	3,9	3,6	4	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8																																
	Kategori	A	A	A	A	A	A	A	A	A																																
IKM Unit Layanan	97 (A atau Sangat Baik)																																									



**Predikat  
AKIP OPD**

Komponen	Total Bobot
Perencanaan Kinerja	23,70
Pengukuran Kinerja	21,60
Pelaporan Kinerja	9,00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18,00
<b>Nilai AKIP</b>	<b>72,30</b>
<b>Predikat</b>	<b>BB</b>

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**Laporan Keuangan Sesuai SAP**

Bupati Tanjab Timur Hj. Dillah Hilmah Sari, S.T memimpin langsung tim Pemkab saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK Perwakilan Jambi di kantor BPK di Jambi, Senin (30/6). Bupati mengatakan sangat bangga dengan opini WTP yang berhasil dipertahankan hingga delapan tahun berturut. Menurutnya hal itu membuktikan tingginya dedikasi aparatur pengelola keuangan dalam menegakkan prinsip - prinsip administrasi yang baik dan akuntabel.



Karena OPD adalah unit akuntansi atau bagian dari entitas pelaporan, bukan entitas pelaporan itu sendiri. Laporan keuangan OPD dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa oleh BPK. Hasil pemeriksaan ini menghasilkan satu opini untuk keseluruhan pemda. Jika banyak OPD bermasalah atau tidak tertib administrasi, maka opini WTP untuk kabupaten bisa terancam turun.

Penyusunan dan Verifikasi Laporan Keuangan

Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Pemerintahan

**Tabel 3.1.8**  
Indikator Sasaran

Indikator Sasaran		Program		Kegiatan							
<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Pemerintahan</b>		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota							
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		1. Administrasi Tata Pemerintahan 2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum							

Program	Anggaran	Total Anggaran	Dana Terserap	Keuangan		Fisik		Bobot	Capaian Kinerja	Capaian Per Kegiatan	Capaian Gabungan
				Target	Realisasi	Target	Realisasi				
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 10.000.000	Rp 6.600.177.009	Rp 6.824.600	100%	68%	100%	100%	0,15%	84,13%	0,13%	99%
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 6.590.177.009		Rp 6.469.847.819	100%	98%	100%	100%	99,85%	99,09%	98,9%	

Dalam upaya meningkatkan kualitas koordinasi di bidang pemerintahan, terdapat beberapa program dan kegiatan yang secara langsung mempengaruhi pencapaian sasaran kinerja. Salah satunya adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang diimplementasikan melalui kegiatan penyelesaian sengketa tanah garapan di wilayah kabupaten/kota. Kegiatan ini memegang peranan penting dalam mengatasi konflik agraria yang sering kali menghambat pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Apabila kegiatan ini berhasil dijalankan secara optimal, maka akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan koordinasi antarinstansi yang selama ini terganggu oleh ketegangan sosial akibat sengketa lahan. Selain itu, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat juga menjadi penopang utama sasaran strategis ini. Kegiatan-kegiatan seperti administrasi tata pemerintahan, pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat, serta fasilitasi dan koordinasi hukum turut mendorong terciptanya sinergi dan

integrasi pelaksanaan program pemerintah. Efektivitas koordinasi sangat dipengaruhi oleh kelancaran administrasi serta kemampuan dalam membangun kesepahaman lintas sektor. Namun demikian, apabila pelaksanaan kegiatan ini tidak konsisten, atau hanya bersifat administratif tanpa sentuhan substantif, maka potensi kegagalan dalam mencapai indikator koordinasi cukup besar.

Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Perekonomian dan Pembangunan

**Tabel 3.1.9**  
Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</b>	Program Perekonomian dan Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</li> <li>2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</li> <li>3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> <li>4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</li> </ol>

Program	Anggaran	Dana Terserap	Keuangan		Fisik		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 2.800.301.381	Rp 2.673.877.588	100%	95%	100%	100%	98%

Sasaran strategis ini difokuskan pada bagaimana kegiatan koordinasi di sektor ekonomi dan pembangunan dijalankan secara terpadu. Program Perekonomian dan Pembangunan menjadi tulang punggung dari pencapaian indikator sasaran ini. Melalui kegiatan seperti pelaksanaan kebijakan perekonomian dan administrasi pembangunan, pemerintah berusaha memastikan bahwa seluruh rencana dan kebijakan di bidang ekonomi terkoordinasi dengan baik antar unit kerja maupun dengan pemangku

kepentingan lainnya. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa juga menjadi elemen kunci dalam mewujudkan koordinasi yang efektif. Proses pengadaan yang transparan dan efisien akan mempermudah pencapaian program prioritas dan mempercepat pembangunan. Sementara itu, kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam berperan penting dalam memastikan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumber daya tidak tumpang tindih dan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Bila keempat kegiatan ini dapat dijalankan secara sinergis dan terpantau dengan baik, maka keberhasilan sasaran strategis ini dapat tercapai. Sebaliknya, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan atau lemahnya pengawasan terhadap kebijakan SDA dapat menjadi pemicu kegagalan yang serius.

Sasaran Strategis 4: Peningkatan Kualitas Koordinasi di Bidang Administrasi Umum

**Tabel 3.1.10**  
Indikator Sasaran

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan
<b>Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program di Bidang Administrasi Umum</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</li> <li>2. Administrasi Keuangan</li> <li>3. Administrasi Barang Milik Daerah</li> <li>4. Administrasi Kepegawaian</li> <li>5. Administrasi Umum</li> <li>6. Pengadaan BMD Peninjang urusan PD</li> <li>7. Penyedia jasa penunjang urusan PD</li> <li>8. Pemeliharaan BMD penunjang urusan PD</li> </ol>

		<p>9. Administrasi Keuangan dan oprasional KD dan wakil KD</p> <p>10. Fasilitasi Kerumahtanggaan</p> <p>11. Penataan Organisasi</p> <p>12. Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p>
--	--	---

Program	Anggaran	Dana Terserap	Keuangan		Fisik		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 34.174.263.204	Rp 32.789.216.211	100%	96%	100%	100%	98%

Peningkatan kualitas koordinasi sangat ditentukan oleh efektivitas kegiatan-kegiatan administratif yang menopang seluruh aspek pemerintahan daerah. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup berbagai kegiatan yang esensial, seperti perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, dan administrasi kepegawaian. Kelancaran proses administrasi tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya koordinasi lintas unit yang baik. Selain itu, dukungan seperti pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan jasa penunjang, serta administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja koordinasi.

### 3.2 REALISASI ANGGARAN

Secara finansial dana rutin yang tersedia maupun untuk membiayai kegiatan sehari-hari, pembayaran gaji, tunjangan, insentif dan lain-lain. Begitu pula dan pembangunan yang cukup memadai untuk melaksanakan program/kegiatan bagian. Untuk penyerapan dan realisasi anggaran tahun 2024 dari pagu dana sebesar **Rp. 43.574.741.594,-** terealisasi sebesar **Rp. 41.939.766.218,-** atau sekitar **(97 %)** dan dana yang tidak terserap **Rp. 1.634.975.376,-**.

Keberhasilan terhadap capaian ini tidak terlepas dari upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Perbaikan tersebut mencakup penyempurnaan mekanisme dan prosedur kerja, peningkatan kualitas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran, penguatan koordinasi dan sinergi antar unit kerja, kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara rutin, baik secara bulanan maupun triwulanan, guna memastikan bahwa program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta menyampaikan laporan kinerja dan penggunaan anggaran secara berkala kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara umum Realisasi Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai berikut :

**Tabel 3.2.1**

Alokasi Anggaran IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

2024							
No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Anggaran	%	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	7		8	9	
1	1 Peningkatan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-		-	-
		2	Predikat AKIP OPD	-		-	-
		3	Laporan Keuangan Sesuai SAP	-		-	-
2	1 Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Pemerintahan	1	Persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang pemerintahan	Rp34.184.263.204	100%	Rp32.796.040.811	96%
	2 Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Perekonomian dan Pembangunan	2	Persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang perekonomian dan pembangunan	Rp6.590.177.009	100%	Rp6.469.847.819	98%
	3 Peningkatan Kualitas Koordinasi diBidang Administrasi Umum	3	Persentase koordinasi pelaksanaan program dibidang administrasi umum	Rp2.800.301.381	100%	Rp2.673.877.588	95%
<b>Total</b>			Rp43.574.741.594	100%	Rp41.939.766.218	97%	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020–2024. Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Daerah berperan strategis sebagai koordinator pemerintahan dan fasilitator administrasi umum untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara umum, capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanjung Jabung Timur tahun 2024 menunjukkan hasil yang positif dan selaras dengan pernyataan kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tercermin dari tingkat pencapaian indikator-indikator kinerja utama yang sebagian besar melampaui target atau mendekati capaian maksimal, antara lain:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik sebesar 97 (dari target 90), menunjukkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara responsif dan profesional.
2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada level BB dengan nilai 72,30, mencerminkan peningkatan sistem pelaporan dan evaluasi kinerja.
3. Laporan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun secara tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah selama delapan tahun berturut-turut. Peran Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam memastikan akurasi dan konsistensi data keuangan serta koordinasi dalam proses konsolidasi laporan menjadi kontribusi nyata terhadap terciptanya tata kelola keuangan yang akuntabel.

Pelaksanaan koordinasi lintas bidang pemerintahan, pembangunan, dan administrasi umum menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan rata-rata capaian indikator di atas 98% dan tingkat realisasi anggaran yang mencapai 95–98%. Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien (tanpa mengurangi kualitas capaian) dan tepat sasaran.

Berdasarkan hasil analisis terhadap program/kegiatan, tidak ditemukan indikator kinerja utama yang gagal dicapai secara signifikan. Beberapa efisiensi anggaran yang terjadi bukan merupakan indikasi lemahnya pelaksanaan, tetapi lebih pada penguatan sistem efisiensi melalui penyesuaian belanja non-prioritas, optimalisasi SDM, dan adaptasi terhadap dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Capaian ini sekaligus menjadi bekal penting dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025–2029, dengan menekankan penguatan peran koordinatif, optimalisasi pelayanan publik berbasis data, dan integrasi kinerja organisasi secara menyeluruh.

## 4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan analisis terhadap pelaksanaan program/kegiatan selama tahun 2024, maka untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di masa mendatang, beberapa rekomendasi strategis berikut perlu menjadi perhatian:

1. Memperkuat peran koordinatif Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai penggerak utama penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sinergi lintas OPD, terutama dalam implementasi kebijakan prioritas daerah.
2. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi (monev) terhadap program/kegiatan secara berkala, baik pada tingkat organisasi maupun individu, dengan mengoptimalkan teknologi informasi.
3. Mengintegrasikan sistem pelaporan kinerja dan keuangan agar lebih adaptif, transparan, dan berbasis hasil (*result-based*).

4. Menyesuaikan indikator kinerja dan target tahunan agar lebih menantang dan relevan dengan arah pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) serta tantangan global yang dinamis.
5. Mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan publik yang lebih terintegrasi dan mudah diakses, sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.
6. Meningkatkan kompetensi SDM Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui pelatihan berbasis kebutuhan dan pengembangan profesionalisme aparatur.
7. Mengoptimalkan sistem informasi dan digitalisasi layanan, baik dalam hal administrasi, koordinasi, maupun layanan publik, sebagai bagian dari transformasi menuju birokrasi digital yang adaptif dan responsif.
8. Dengan pelaksanaan rekomendasi ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan berpihak kepada pelayanan masyarakat.

Muara Sabak, 20 Januari 2025

Sekretaris Daerah,



H. SAPRIL, S.IP.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

## SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Telp. (0740) 7370025 Fax. (0740) 7370002  
MUARA SABAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH.

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

- b. Pembina : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
- c. Penanggungjawab : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda
- d. Anggota :
  1. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
  2. Kepala Bagian Hukum Setda
  3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda
  4. Kepala Bagian Umum Setda
  5. Kepala Bagian Organisasi Setda
  6. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda
  7. Kepala Bagian Pembangunan Setda
  8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda
  9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda

**KEDUA** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. mengordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
- c. melakukan observasi pada Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024;
- d. melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mengikutsertakan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanjung Jabung Timur melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2025 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 3 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



H. SAPRIL

Tembusan, kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SAPRIL, S. IP**

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. ROMI HARIYANTO, SE**

Jabatan : Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
**H. ROMI HARIYANTO, SE**



Muara Sabak,  
Pihak Pertama,

2024

  
**SAPRIL, S. IP**

**PERJANJIAN KINERJA  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah  
Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Predikat AKIP OPD 3. Laporan Keuangan sesuai SAP	90 BB Sesuai
2.	Terwujudnya koordinasi Pemerintahan Kabupaten	1. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program dibidang Administrasi 2. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program dibidang Pemerintahan 3. Persentase Koordinasi Pelaksanaan Program dibidang Perekonomian dan Pembangunan	100% 100% 100%

Jumlah APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp. 43.574.741.594,- yang terdiri dari :

1. Belanja Pegawai Sebesar	Rp.	14.186.899.512,-
2. Belanja Barang dan Jasa Sebesar	Rp.	25.057.038.929,-
3. Belanja Hibah Sebesar	Rp.	1.450.000.000,-
4. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebesar	Rp.	2.332.803.153,-
5. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sebesar	Rp.	253.000.000,-
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	295.000.000,-

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 10.000.000,-	APBDP
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 34.174.263.204,-	APBDP
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp. 6.590.177.009,-	APBDP
4.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 2.800.301.381,-	APBDP

Pihak Kedua,

H. ROMI HARIYANTO, SE



Pihak Pertama,

SAPRIL, S.IP